



EKOTELOGI ISLAM DAN KRISIS IKLIM MEMBANGUN JALAN ETIS DAN BERKELANJUTAN

Fakhriati,

Peneliti bidang kajian agama dan kemasyarakatan, BRIN

Insan Khoirul Qolbi,

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Agama RI

Ita Konita,

Peneliti, BRIN

Pendahuluan

Perubahan iklim telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang mengancam ekologi, kesehatan, ekonomi, dan kohesi sosial. Di Indonesia, dampaknya terlihat jelas melalui banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang mendominasi kejadian bencana. Tren pemanasan yang berulang menegaskan bahwa gangguan iklim bukan sekadar variasi musiman, melainkan pergeseran struktural yang memerlukan adaptasi jangka panjang.

Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini, tetapi juga menggerakkan perubahan perilaku kolektif. Perubahan perilaku membutuhkan legitimasi sosial yang kuat dan bahasa moral yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks mayoritas Muslim, ekoteologi Islam menyediakan landasan etik yang dapat memperkuat tanggung jawab publik terhadap lingkungan.

Policy Brief Series

April 2026



Ditujukan Kepada

- Menteri Agama Republik Indonesia
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di wilayah rawan bencana hidrometeorologis

Ringkasan Eksekutif

Krisis iklim di Indonesia semakin nyata melalui dominasi bencana hidrometeorologis dan tren pemanasan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Walau kebijakan mitigasi dan adaptasi telah tersedia, pelaksanaannya sering masih teknokratis dan belum terhubung kuat dengan bahasa nilai yang hidup di masyarakat, sehingga perubahan perilaku kolektif tidak bergerak secepat yang dibutuhkan.

Policy brief ini menawarkan tiga alternatif, yaitu reformasi tafsir ekologis dan pedoman dakwah iklim, pengembangan kurikulum ekoteologi untuk pendidikan formal dan nonformal, serta penguatan tata kelola kolaboratif berbasis institusi keagamaan. Rekomendasi utama adalah strategi bertahap yang dimulai dari langkah cepat dan berbiaya rendah melalui pendidikan, dakwah, dan penguatan kelembagaan masjid serta pesantren, lalu dikonsolidasikan pada level daerah dan nasional.



Deskripsi Masalah

Masalah 1. Ketimpangan implementasi kebijakan iklim dan lemahnya integrasi nilai publik. Perangkat kebijakan iklim telah tersedia, namun implementasi sering terbatas pada ranah administratif dan teknis. Ketika kebijakan tidak bertemu dengan nilai dan norma publik, ia kehilangan daya dorong moral, partisipasi sosial melemah, dan perubahan perilaku tidak konsisten di lapangan.

Masalah 2. Kurangnya kesadaran sosial yang terlembaga dan rendahnya literasi ekologis berbasis agama. Dominasi bencana hidrometeorologis menunjukkan krisis iklim hadir dalam pengalaman sehari-hari warga, namun literasi ekologis berbasis agama belum menjadi arus utama dalam pendidikan, dakwah, dan tata kelola kelembagaan. Kesenjangan ini membuat respons publik cenderung sporadis, reaktif, dan tidak terukur, padahal institusi keagamaan memiliki jejaring luas yang dipercaya publik.

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1. Reformasi tafsir ekologis dan pedoman dakwah iklim

- Menyusun pedoman tafsir tematik ekologi dan fiqh lingkungan untuk khutbah, pengajian, dan penyuluhan.
- Menekankan nilai mizan, amanah, masalah, larangan israf, dan perlindungan ciptaan sebagai pesan inti.
- Menyediakan contoh aksi terukur seperti pengelolaan sampah berbasis masjid, efisiensi energi, dan hemat air.

Alternatif 2. Pengembangan kurikulum berbasis ekoteologi untuk pendidikan formal dan nonformal

- Mengintegrasikan modul ekoteologi pada madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan, dan pelatihan penyuluh.
- Menghubungkan ajaran keislaman, sains iklim, dan praktik adaptasi yang relevan di Indonesia.

- Melengkapi dengan bahan ajar ringkas dan konten digital untuk memperluas jangkauan dan konsistensi pembiasaan.

Alternatif 3. Tata kelola kolaboratif berbasis institusi keagamaan

- Menjadikan masjid dan pesantren sebagai simpul aksi melalui program masjid ramah lingkungan dan pesantren hijau.
- Membangun kemitraan pemerintah daerah, ormas Islam, komunitas perempuan, kelompok rentan, dan pelaku usaha lokal.
- Menetapkan indikator sederhana untuk monitoring bersama agar program tidak simbolik dan mudah direplikasi.

Rekomendasi

Tahap 1, langkah cepat 0 sampai 12 bulan. Kementerian Agama memimpin penyusunan pedoman tafsir ekologis dan materi dakwah iklim, lalu mendistribusikannya melalui penyuluh, KUA, dan jejaring ormas. Modul literasi iklim untuk majelis taklim dan remaja masjid disiapkan dalam format ringkas dan digital, dengan prioritas wilayah rawan banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

Tahap 2, langkah menengah 1 sampai 3 tahun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengintegrasikan modul ekoteologi ke dalam kurikulum dan program pengabdian masyarakat, dengan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan sebagai lokomotif implementasi.

Tahap 3, langkah panjang 3 sampai 5 tahun. Membangun arsitektur kolaborasi nasional melalui program masjid ramah lingkungan dan pesantren hijau yang terhubung dengan kebijakan iklim pemerintah daerah, disertai indikator, monitoring, serta skema pengakuan dan insentif agar program berkelanjutan.



Daftar Pustaka

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). Catatan iklim dan kualitas udara Indonesia 2024. BMKG. <https://iklim.bmkg.go.id/bmkgadmin/storage/buletin/Catatan%20iklim%20dan%20Kualitas%20Udara%202024%20BMKG.pdf>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). INFOBENCANA: Data dan informasi kebencanaan bulanan teraktual (Vol. 6, No. 1, Januari 2025). Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom), BNPB. <https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/2025%20Buletin%20Info%20Bencana/2025%20Januari/Buletin%20Info%20Bencana%20Januari%202025.pdf>
- United Nations Environment Programme. (2022). Emissions gap report 2022: The closing window—Climate crisis calls for rapid transformation of societies. UNEP. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015, August 18). Islamic declaration on climate change. UNFCCC. <https://unfccc.int/news/islamic-declaration-on-climate-change>

